



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 1 (2025) pp: 443-448

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Analisis Peran Pemerintah dalam Memberikan Program Bantuan dan Pelatihan untuk Meningkatkan Produktivitas Industri Rumahan

Moh. Rasidi¹, Erinda Sulistiana²

^{1,2} Universitas Nurul Jadid

¹Muhammad.rosyidi09@gmail.com, ²ekn.2142400034@unuja.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keterlibatan pemerintah, khususnya melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, dalam menyalurkan program bantuan serta pelatihan guna mendorong peningkatan produktivitas industri rumahan di Kecamatan Gading. Studi ini memfokuskan pada eksplorasi jenis dukungan dan pelatihan yang telah diberikan, cara penyalurannya, serta pengaruhnya terhadap peningkatan efisiensi, produktivitas, dan daya saing pelaku usaha mikro dan kecil di sektor tersebut. Pendekatan yang digunakan bersifat kualitatif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam terhadap pelaku dan karyawan industri rumahan serta perwakilan DKUPP, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi. Temuan dari studi ini diharapkan mampu mengungkap faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat keberhasilan program, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran untuk memperkuat eksistensi industri rumahan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan peran pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman lebih lanjut mengenai peran intervensi pemerintah dalam pengembangan sektor informal dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi di tingkat kecamatan.

Kata kunci: Industri Rumahan, Peran Pemerintah, Produktivitas

1. Latar Belakang

Saat ini, industri rumahan di Indonesia tengah berkembang dengan sangat cepat. Sektor ini memiliki potensi besar dalam membantu pemerintah mengatasi permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, industri rumahan di tanah air tergolong stabil serta mampu bertahan di tengah krisis ekonomi. Pertumbuhannya memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ekonomi lokal dan terus menunjukkan peningkatan sejalan dengan kemajuan ekonomi secara keseluruhan.[1]

Industri rumahan menghadapi sejumlah tantangan, terutama yang berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM), lemahnya sistem pendukung, serta belum optimalnya implementasi kebijakan dan regulasi yang ada. Masalah pada aspek SDM umumnya disebabkan oleh tingkat pendidikan, keterampilan, dan pengalaman yang masih terbatas, serta kurangnya akses terhadap informasi yang relevan. Selain itu, mayoritas pelaku UMKM juga belum memiliki kemampuan kewirausahaan yang cukup, terlihat dari kecenderungan mereka yang lebih terfokus pada aktivitas produksi dibandingkan dengan penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan dan permintaan pasar.[2]

Pemerintah memiliki peran krusial dalam mendukung kemajuan ekonomi lokal, khususnya pada sektor industri kecil dan rumah tangga. Tugas pemerintah meliputi penyusunan kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan dan pelatihan yang sesuai. Pemerintah juga dituntut untuk bersikap proaktif dalam menciptakan gagasan dan inovasi, bukan hanya menjadi pengamat pasif yang menunggu laju perkembangan ekonomi dari kekuatan eksternal yang berada di luar kendali mereka.[3] Peran pemerintah mencakup berbagai tindakan dan kewajiban yang dilakukan oleh institusi atau struktur pemerintahan dalam mengatur, mengelola, serta mengarahkan jalannya kehidupan bernegara. Berdasarkan teori Gede Diva yang dikutip oleh Rahmadayanti (2021), pemerintah menjalankan tiga jenis peran utama, yaitu peran pemerintah sebagai fasilitator, katalisator, regulator.[4]

Menurut Haryono (2000), secara umum pemerintah, baik pusat maupun daerah, memiliki tiga fungsi utama: pengaturan melalui peraturan dan undang-undang, pelayanan kepada masyarakat, serta pemberdayaan dengan

mendukung otonomi daerah melalui kewenangan dalam mengelola sumber daya lokal. Pemberdayaan sendiri merupakan upaya memperkuat kelompok lemah agar mandiri dan berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas dan akses terhadap berbagai aspek kehidupan (Hendrawati, 2018; Octama et al., 2021).[5]

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan deskriptif kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yaitu pandangan yang menentang asumsi-asumsi mutlak dalam positivisme. Metode ini bertujuan untuk memahami objek dalam konteks alaminya, berbeda dengan pendekatan eksperimental. Dalam pelaksanaannya, peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Data dikumpulkan melalui teknik triangulasi, yakni dengan menggabungkan berbagai metode. Proses analisis data dilakukan secara induktif atau kualitatif, dengan penekanan pada makna yang dihasilkan, bukan pada generalisasi.[6]

2.1 Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini berada di Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, yang berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan. Fokus penelitian diarahkan pada dua pelaku industri rumahan di Kecamatan Gading yang telah mendapatkan bantuan serta pelatihan dari DKUPP Kabupaten Probolinggo.

2.2 Narasumber (Informan)

Dalam penelitian kualitatif, narasumber memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya sebagai pemberi tanggapan, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki dan menyampaikan informasi. Oleh karena itu, mereka disebut sebagai informan, yaitu individu yang menjadi sumber informasi atau data. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*.

Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2019), *purposive sampling* adalah metode pemilihan sampel atau informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu. Artinya, sampel atau informan dipilih karena memenuhi kriteria atau syarat khusus yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.[7]

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lincoln & Guba (1985), pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (seperti catatan atau arsip).[8]

- a. Menurut Nasution (1988), observasi merupakan landasan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan sangat bergantung pada data, yakni informasi faktual yang diperoleh melalui kegiatan pengamatan langsung terhadap kenyataan.[6]
- b. Wawancara dengan informan digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan data dan informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Bogdan dan Biklen (1982) mengartikan wawancara sebagai bentuk percakapan yang diarahkan pada tujuan tertentu, biasanya berlangsung antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak mengarahkan jalannya percakapan untuk memperoleh informasi.[8]
- c. Dalam pendekatan kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data. Sebagaimana dijelaskan oleh Nasution (1988) dan Faisal (1990), dalam penelitian naturalistik, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditafsirkan oleh peneliti, dengan bantuan instrumen pelengkap seperti dokumentasi foto, catatan lapangan, serta dokumen lain yang berkaitan dengan fokus studi.[8]

2.4 Teknik Analisis Data

a Reduksi Data

Reduksi data merupakan langkah untuk menyaring dan merangkum informasi yang dianggap penting, dengan menekankan pada aspek-aspek yang relevan serta mengenali tema dan pola yang muncul dari data. Proses ini bertujuan untuk memperjelas pemahaman, mempermudah peneliti dalam tahap pengumpulan data berikutnya, serta memfasilitasi pencarian data di kemudian hari. Penggunaan perangkat elektronik, seperti komputer mini, dapat membantu dalam memberi kode pada elemen-elemen tertentu dalam data tersebut.

b Penyajian Data

Dalam studi kualitatif, data dapat disajikan dalam beragam format seperti deskripsi naratif, diagram, maupun bagan alur. Miles dan Huberman (1984) menyebutkan bahwa penyajian dalam bentuk teks naratif

merupakan metode yang paling sering digunakan. Bentuk penyajian ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap suatu peristiwa serta membantu peneliti dalam menentukan langkah selanjutnya.

c. Verifikasi atau Penarikan Kesimpulan

Menurut Miles dan Huberman, tahap ketiga dalam analisis data kualitatif adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang ditarik pada awalnya bersifat sementara dan dapat direvisi apabila tidak ditemukan bukti yang cukup kuat. Namun, apabila kesimpulan tersebut didukung oleh data yang valid, maka dapat dianggap sah dan meyakinkan. Hasil dari proses ini bisa berupa temuan baru, gambaran suatu objek, hubungan sebab-akibat, hipotesis, maupun teori yang dikembangkan.[6]

3. Hasil dan Diskusi

Peran pemerintah dalam menyediakan program bantuan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas industri rumahan sangat krusial, karena hal ini berpotensi membantu pelaku usaha kecil dalam meningkatkan keterampilan, kualitas produk, serta daya saing di pasar. Melalui bantuan yang mencakup permodalan, akses pemasaran, serta pelatihan teknis dan manajerial, industri rumahan dapat berkembang lebih cepat dan berkelanjutan. Selain itu, dukungan dari pemerintah juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendorong pemerataan ekonomi, khususnya di daerah pedesaan atau wilayah yang kurang berkembang. Pemerintah Kabupaten Probolinggo, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, khususnya Divisi Perindustrian, telah menetapkan kebijakan yang bertujuan mendukung pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) yang berbasis pada industri rumahan. Salah satu implementasi kebijakan ini adalah penyelenggaraan program bantuan dan pelatihan yang ditujukan kepada pelaku usaha kecil di sektor industri rumahan.

Setiap tahunnya, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, khususnya melalui Divisi Perindustrian, mengadakan program bantuan dan pelatihan untuk para pelaku industri rumahan yang telah mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Di Kecamatan Gading, program ini menjadi salah satu langkah strategis dalam meningkatkan kapasitas usaha masyarakat setempat. Namun, menurut data yang disampaikan oleh DKUPP, hanya dua pelaku industri rumahan di Kecamatan Gading yang mengajukan proposal dan berhasil menerima bantuan serta pelatihan tersebut, yakni Bapak Abdul Mukti yang menjalankan usaha IKM kripik pisang dan Ibu Srijati yang mengelola IKM mie bayam). Salah satu program unggulan yang dilaksanakan adalah pemberian bantuan alat produksi (barang hibah) yang mendukung kegiatan usaha serta pelatihan terkait *marketing mix* (bauran pemasaran) bagi penerima bantuan tersebut. Peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas industri rumahan sangat krusial dan strategis, mengingat potensi sektor ini untuk menjadi pendorong utama perekonomian di tingkat lokal. Di Kecamatan Gading, peran tersebut terwujud melalui berbagai program, seperti pemberian bantuan alat produksi (barang hibah) dan pelatihan *marketing mix* (bauran pemasaran).

Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Reta Candra Yudistriawan, salah satu staf yang juga bertanggung jawab atas program ini, beliau menekankan betapa pentingnya peran pemerintah dalam meningkatkan produktivitas industri rumahan. Pemerintah, melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo, melaksanakan berbagai program bantuan dan pelatihan yang sangat strategis. Program-program ini tidak hanya mencakup pemberian alat produksi (barang hibah), tetapi juga meliputi pelatihan tentang *marketing mix*, serta pemberian fasilitas surat izin usaha, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas, kapasitas produksi, serta legalitas usaha dari pelaku industri kecil dan menengah (IKM). Di Kecamatan Gading, program ini telah berhasil menasar dua pelaku industri rumahan, yaitu Bapak Abdul Mukti yang bergerak di bidang produksi kripik pisang dan Ibu Srijati yang mengelola usaha mie bayam. Kedua pelaku usaha ini telah menerima bantuan serta mengikuti pelatihan yang diselenggarakan. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah ini merupakan upaya nyata untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal serta memberdayakan usaha kecil agar lebih berkembang dan mampu bersaing di pasar.

a. Program Bantuan Alat Produksi (Barang Hibah)

Hibah merupakan tindakan memberikan aset atau kepemilikan secara cuma-cuma oleh seseorang kepada pihak lain. Pemberian ini dilakukan atas keinginan sendiri, tanpa mengharapkan balasan apa pun, dan terjadi ketika si pemberi masih hidup. Umumnya, motivasi di balik hibah adalah rasa sayang, niat baik, atau dedikasi terhadap kegiatan sosial maupun keagamaan.[9]

Pemerintah memegang peranan krusial dalam upaya peningkatan produktivitas sektor industri rumahan melalui penyediaan program bantuan yang terarah. Implementasi program bantuan alat produksi, seperti yang dijalankan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Gading, telah membuktikan dampaknya yang positif. Inisiatif ini tidak sekadar menambah kapasitas produksi, melainkan juga mendorong adopsi teknologi modern yang esensial dalam

mempercepat alur kerja, menekan potensi pemborosan sumber daya, dan menghasilkan produk dengan standar kualitas yang lebih tinggi. Pengalaman langsung dari para pelaku industri rumahan penerima bantuan, seperti Bapak Abdul Mukti dan Ibu Srijati, menggarisbawahi betapa signifikannya kontribusi alat produksi yang disalurkan oleh DKUPP. Bantuan ini tidak hanya mempercepat ritme produksi dan meningkatkan mutu hasil kerja, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang nyata. Peningkatan kecepatan produksi berbanding lurus dengan potensi peningkatan penjualan, yang pada akhirnya bermuara pada pertumbuhan pendapatan dan pengurangan beban kerja operasional bagi para pengusaha mikro tersebut.

Lebih lanjut, mekanisme pengajuan bantuan yang melibatkan proses administrasi seperti surat keterangan dari desa dan verifikasi oleh DKUPP menunjukkan pentingnya aspek administratif dalam memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran. Proses ini secara tidak langsung juga menanamkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi di kalangan pelaku industri rumahan, sekaligus mempererat relasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah. Selain itu, survei berkala yang dilakukan setelah penyaluran bantuan menjadi mekanisme evaluasi yang krusial untuk memastikan pemanfaatan bantuan secara optimal dan mencegah terjadinya penyalahgunaan, sehingga keberlanjutan dan dampak positif program dapat terus dipantau dan ditingkatkan.

Secara keseluruhan, program bantuan yang diinisiasi oleh DKUPP Kabupaten Probolinggo telah memberikan kontribusi yang berarti dalam mendongkrak produktivitas industri rumahan di Kecamatan Gading. Penguatan sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha melalui program ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga berperan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi disparitas ekonomi di tingkat pedesaan. Keberhasilan program ini mengilustrasikan bagaimana intervensi pemerintah yang tepat sasaran dapat menjadi katalisator bagi perkembangan sektor usaha kecil dan menengah, yang pada gilirannya akan memperkuat fondasi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

b. Program Pelatihan *Marketing Mix* (Bauran Pemasaran)

Marketing mix, atau bauran pemasaran, merupakan sebuah strategi krusial yang memberdayakan industri rumahan untuk memperkuat daya saing, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan mengoptimalkan penjualan melalui pengintegrasian berbagai elemen pemasaran. Strategi ini berfokus pada kombinasi taktis dari beberapa aspek pemasaran guna menjangkau sasaran pasar yang tepat dan memberikan nilai yang paling menguntungkan bagi konsumen, yang secara fundamental terdiri dari empat komponen utama yang dikenal sebagai 4P: Produk (*Product*), Harga (*Price*), Tempat (*Place*), dan Promosi (*Promotion*). [10] Dalam upaya meningkatkan produktivitas, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Pada aspek produk (*product*), kemasan yang menarik serta pencantuman label UMKM dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan daya tarik produk di mata konsumen. Selanjutnya, aspek harga (*price*) menuntut pelaku UMKM untuk memiliki kemampuan dalam menentukan harga jual yang sesuai. Dinamika persaingan harga di pasar sangat memengaruhi kelancaran proses transaksi dan tingkat permintaan.

Pada aspek tempat (*place*), lokasi usaha berperan sebagai titik sentral dalam kegiatan penjualan dan pemberian layanan. Oleh karena itu, pemilihan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau menjadi elemen penting dalam strategi pemasaran. Terakhir, pada aspek promosi (*promotion*), kegiatan promosi dapat dilaksanakan secara fleksibel, kapan pun dan di mana pun. Apalagi, kemajuan teknologi serta peran aktif media sosial saat ini memberikan peluang luas bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen di berbagai wilayah, bahkan hingga ke seluruh penjuru Nusantara. [11] *Marketplace* adalah model *E-Commerce* yang memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli, memungkinkan penjual melayani konsumen hanya dengan *smartphone* tanpa perlu mengelola situs web karena semua telah ditangani oleh *platform* (Rahman, 2022). [12]

Pemerintah, melalui DKUPP Kabupaten Probolinggo, memainkan peran sentral dalam memajukan produktivitas industri rumahan di Kecamatan Gading. Keterlibatan aktif ini tercermin dalam program pelatihan yang mengintegrasikan pemahaman mendalam tentang *marketing mix* dan fasilitas izin usaha. Kombinasi antara aspek legalitas usaha melalui NIB, PIRT, Label Halal, dan HKI dan penguatan kapasitas pemasaran melalui *marketing mix* terbukti menjadi strategi sinergis yang efektif. Pelatihan simultan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri pelaku usaha mikro, tetapi juga membuka peluang perluasan pasar dan akselerasi produksi, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Abdul Mukti dan Ibu Srijati.

Keberadaan NIB memiliki korelasi erat dengan persepsi pasar terhadap kredibilitas produk yang dihasilkan oleh industri rumahan. Legalitas formal yang diperoleh melalui NIB bukan sekadar memenuhi persyaratan hukum, melainkan juga membangun kepercayaan konsumen dan membuka pintu akses ke pasar yang lebih luas. Testimoni dari karyawan Bapak Abdul Mukti mengindikasikan adanya peningkatan penerimaan produk di pusat oleh-oleh setelah pelaku usaha memiliki NIB. Sementara itu, pelatihan *marketing mix* mengenalkan dimensi krusial dalam pengelolaan usaha, meliputi inovasi produk, penetapan harga yang kompetitif, pengelolaan distribusi yang efektif, dan strategi promosi yang tepat (sesuai dengan kerangka kerja 4P).

Sinergi *marketing mix* dan legalitas usaha menunjukkan pendekatan pemberdayaan yang bertahap dan komprehensif. Dimulai dari legalisasi usaha melalui NIB, dilanjutkan dengan penguatan strategi pemasaran, hingga akhirnya bermuara pada peningkatan produktivitas. Intervensi pemerintah ini tidak hanya memberikan dampak jangka pendek berupa peningkatan output produksi, tetapi juga menanamkan pola pikir yang lebih profesional dan berorientasi pada visi jangka panjang bagi para pelaku usaha mikro. Dengan demikian, program ini berkontribusi signifikan terhadap tujuan makro pemerintah, yaitu pengurangan angka pengangguran dan pemerataan ekonomi di tingkat lokal.

Partisipasi yang rendah dari para pengusaha industri rumahan di Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, dalam program bantuan dan pelatihan yang diadakan oleh DKUPP setempat, mengindikasikan adanya permasalahan kompleks yang saling terkait antara aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Observasi lapangan mengungkapkan bahwa kurangnya penyebaran informasi yang efektif, pemahaman yang minim terkait aspek legalitas usaha, kesadaran yang rendah akan pentingnya strategi pemasaran, tingkat kepercayaan yang belum tinggi terhadap pemerintah, serta kendala waktu yang dihadapi oleh para pelaku usaha menjadi faktor-faktor signifikan. Hal ini menggarisbawahi bahwa ketersediaan fasilitas dari pemerintah saja tidak menjamin keberhasilan program, melainkan bagaimana informasi tersebut disampaikan dan sejauh mana kebutuhan para pelaku usaha dipahami secara mendalam.

Keterbatasan sosialisasi menjadi penyebab utama kurangnya pengetahuan pelaku usaha, seperti yang disampaikan oleh Bapak Abdul Mukti. Sementara itu, persyaratan legalitas yang rumit tanpa adanya pendampingan yang memadai memperkuat anggapan mengenai kesulitan administratif, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Reta Candra. Di sisi lain, pandangan Ibu Srijati menyoroti bahwa pelaku usaha yang menyadari pentingnya inovasi bisnis dan strategi pemasaran modern cenderung lebih mampu memanfaatkan program yang ditawarkan. Analisis lebih lanjut menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas program, pemerintah perlu mengadopsi metode komunikasi yang lebih personal dan langsung, memperluas jangkauan sosialisasi hingga ke tingkat akar rumput, menyederhanakan proses birokrasi legalitas melalui pendampingan aktif, membangun kepercayaan melalui transparansi, serta merancang program yang lebih fleksibel sesuai dengan keterbatasan waktu para pelaku usaha. Dengan demikian, peran ideal pemerintah tidak hanya sebatas penyedia program bantuan dan pelatihan, melainkan juga sebagai fasilitator aktif yang mampu memahami dinamika riil yang dihadapi oleh para pelaku industri rumahan di lapangan. Pemerintah perlu berinteraksi secara lebih dekat, mendengarkan aspirasi, dan memberikan solusi yang tepat sasaran agar program yang ditawarkan dapat benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kapasitas usaha mikro di Kecamatan Gading. Pendekatan yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha diyakini akan meningkatkan partisipasi dan pada akhirnya, memberikan dampak positif yang lebih signifikan terhadap perkembangan ekonomi lokal.

4. Kesimpulan

Peran krusial pemerintah dalam meningkatkan produktivitas industri rumahan di Kabupaten Probolinggo, khususnya melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP), terwujud melalui berbagai program bantuan dan pelatihan. Inisiatif ini bertujuan untuk memberdayakan pelaku usaha kecil dengan meningkatkan keterampilan, kualitas produk, dan daya saing di pasar. Bantuan yang diberikan mencakup permodalan (dalam bentuk barang hibah alat produksi), akses pemasaran, serta pelatihan teknis dan manajerial, seperti strategi *marketing mix* dan fasilitas pembuatan izin usaha. Program-program ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kesenjangan ekonomi, terutama di wilayah yang kurang berkembang. Implementasi program bantuan alat produksi (barang hibah) oleh DKUPP Kabupaten Probolinggo di Kecamatan Gading telah memberikan dampak positif bagi penerimanya, seperti Bapak Abdul Mukti dan Ibu Srijati. Bantuan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas dan kecepatan produksi, tetapi juga berpotensi meningkatkan kualitas produk dan pendapatan usaha. Proses pengajuan bantuan yang melibatkan administrasi dan verifikasi memastikan ketepatan sasaran, sementara survei berkala berfungsi sebagai mekanisme evaluasi untuk keberlanjutan program. Secara keseluruhan, program ini memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha, mendorong efisiensi operasional, dan memberdayakan ekonomi di tingkat pedesaan. Selain bantuan alat produksi, program pelatihan *marketing mix* juga memegang peranan penting. Pelatihan *marketing mix* membekali pelaku usaha dengan pengetahuan tentang produk, harga, tempat (distribusi), dan promosi (4P), yang esensial untuk meningkatkan daya saing dan penjualan. Kombinasi kedua pelatihan ini menciptakan pendekatan pemberdayaan yang komprehensif, dimulai dari legalisasi usaha hingga penguatan strategi pemasaran, yang diharapkan berdampak jangka panjang pada profesionalisme dan pertumbuhan usaha mikro. Meskipun program-program ini memiliki potensi besar, partisipasi pelaku industri rumahan di Kecamatan Gading masih tergolong rendah. Beberapa faktor yang menjadi penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi yang efektif, pemahaman yang minim tentang aspek legalitas usaha, rendahnya kesadaran akan pentingnya

pemasaran, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, serta keterbatasan waktu pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan program saja tidak cukup; pemerintah perlu lebih proaktif dalam menyampaikan informasi, menyederhanakan proses birokrasi, membangun kepercayaan, dan menyesuaikan program dengan kebutuhan riil pelaku usaha di lapangan. Untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih personal dan langsung dalam sosialisasi, memperluas jangkauan informasi, memberikan pendampingan aktif dalam proses legalitas, membangun transparansi, dan merancang program yang lebih fleksibel. Peran pemerintah yang ideal bukan hanya sebagai penyedia bantuan dan pelatihan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memahami dinamika lapangan dan memberikan solusi yang tepat sasaran. Dengan interaksi yang lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha, diharapkan partisipasi akan meningkat dan dampak positif program terhadap perkembangan ekonomi lokal akan semakin signifikan.

Referensi

- [1] N. Rahmadiyah, M. R. Hafizi, and A. H. Asianingrum, "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Strategi Pemasaran Industri Rumahan di Kota Palangka Raya," *J. Manaj. Din.*, vol. 2, no. 1, p. 11, 2024, doi: 10.59330/jmd.v2i1.31.
- [2] I. Masriah, E. Hotimah, N. I. Dede, and ..., "Tantangan Dan Solusi Bisnis UMKM Di Era New Normal," *JPPJ J. ...*, pp. 210–211, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.stebisypii.com/index.php/jppi/article/view/13>
- [3] R. D. Djadjuli, "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah," *Din. J. Ilm. Ilmu Adm. Negara*, vol. 5, no. 2, pp. 8–21, 2018, [Online]. Available: <https://jurnal.unigal.ac.id/dinamika/article/view/1409/1156>
- [4] A. Salam, S. Kamariyah, and I. D. Pramudiana, "Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program PKK Kemajet di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang," *Soetomo Adm. Publik*, vol. 2, no. 1, pp. 1–12, 2024.
- [5] D. Junaedi, E. Sulistiana, D. E. Paulia, R. Jannah, M. P. Pratiwi, and I. Ramadhani, "GOTONG ROYONG PKM Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Home Industry Donat Berbasis Komunitas di Desa Sumberanyar Kecamatan Paiton Probolinggo," pp. 110–116, 2024.
- [6] Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: ALFABETA, cv, 2013.
- [7] J. Ani, B. Lumanauw, and J. L. A. Tampenawas, "Pengaruh Citra Merek, Promosi Dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada E-Commerce Tokopedia Di Kota Manado the Influence of Brand Image, Promotion and Service Quality on Consumer Purchase Decisions on Tokopedia E-Commerce in Manado," *663 J. EMBA*, vol. 9, no. 2, pp. 663–674, 2021.
- [8] Salim and Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media, 2012.
- [9] M. Kumalasari and S. H. Nuswardhani, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Hibah Atas Barang Berharga Yang D hibahkan Dan Akibat Hukumnya," 2021, [Online]. Available: [https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/94878%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/94878/1/REVISI NASPUB PERJANJIAN HIBAH.pdf](https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/94878%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/94878/1/REVISI_NASPUB_PERJANJIAN_HIBAH.pdf)
- [10] M. A. Yasmin, N. E. Agata, A. Nauli, and R. V. Mauboy, "Literature Review : Strategi Pemasaran Marketing Mix terhadap UMKM Lokal," vol. 7, no. 2, pp. 287–294, 2024.
- [11] R. F. E. Pradani, D. W. Hasanah, M. Fitriyah, F. Sa'adah, and N. F. Hakiki, "Strategi Pengembangan UMKM Rumah Jahit F-Ros Collection terhadap Kebijakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (DISKOPERINDANG) Kabupaten Situbondo," *J. Mhs. Entreprenur*, vol. 4, no. 1, pp. 139–149, 2025.
- [12] M. Rasidi, M. Syafiih, M. Khairi, I. Ariska, S. I. Rahayu, and S. Hati, "Pelatihan Pemasaran Online Berbasis Marketplace Bagi Kelompok Ibu PKK di Desa Kalianan Krucil Probolinggo," *JILPI J. Ilm. Pengabd. dan Inov.*, vol. 2, no. 1, pp. 197–208, 2023, doi: 10.57248/jilpi.v2i1.265.